

IMPLEMENTASI APLIKASI BANK SAMPAH PANCADAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KURANJI KOTA PADANG

Safuan Nada Fatmi ¹, Syamsir ², Nanda Aulia ³, Putri Regina ⁴,
Tricillia Agustina ⁵, Genta Firanda Putra ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

Email : safuannada@gmail.com ¹, syamsirsaili@yahoo.com ², nandaau180802@gmail.com ³,
utigina856@gmail.com ⁴, triciliaagustina01@gmail.com ⁵, gentaafp25@gmail.com ⁶

Abstrack

The waste bank is a container that can solve the problems that the community is currently experiencing through a program by utilizing dry waste to sort and having management like banking but what is stored is waste. The management of the Pancadaya Kuranji Garbage Bank, Padang City, has used many ways to change people's environmental care behavior. The focus of this research is to find an overview of waste bank management efforts, including: knowing the implementation, obstacles, and efforts made in overcoming obstacles to implementing the garbage bank application. in realizing pancadaya good governance in Kuranji, Padang city. This study uses a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation studies. The discussion of this research is based on data from interviews with secretaries, coordinators, and members at the Pancadaya Kuranji Garbage Bank, Padang City. The theoretical studies used are Good governance, E-Government, Aspects of Digital Governance, The Role of Digital Governance in realizing good governance, Garbage Bank , and the Garbage Bank Application. The results of this study indicate that the Pancadaya Garbage Bank Application has not been able to provide maximum service. Because the application features are not related to service to the community, and data processing of people who carry out waste transactions. In terms of limited facilities and infrastructure, the solution is in the form of government policy to embrace the private sector in the form of integrated cooperation which certainly benefits both parties

Keyword: Governace, Digital, Rubbish, Management

Abstrak

Bank sampah merupakan salah satu wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang masyarakat alami melalui program dengan memanfaatkan sampah kering untuk dipilah serta memiliki manajemen seperti perbankan tetapi yang di tabung adalah sampah. Banyak cara yang dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Pancadaya Kuranji Kota Padang untuk merubah perilaku peduli lingkungan masyarakat. Fokus penelitian ini untuk menemukan gambaran tentang upaya pengelolaan bank sampah, di antaranya: mengetahui implementasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengimplementasian aplikasi Bank sampah dalam mewujudkan good governance pancadaya di Kuranji kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pembahasan penelitian ini berdasarkan data hasil wawancara terhadap sekretaris, koordinator, dan anggota di Bank Sampah Pancadaya Kuranji Kota Padang. Kajian teori yang digunakan adalah Good governance, E-Government, Aspek-aspek Governansi Digital, Peran Governansi digital dalam mewujudkan good governance, Bank Sampah, dan Aplikasi Bank Sampah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Bank Sampah Pancadaya belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Karena fitur aplikasi tidak terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, dan pengolahan data orang yang melakukan transaksi sampah. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, Solusinya berupa kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Governansi, Digital, Sampah, Pengelolaan

LATAR BELAKANG

Kehidupan pada era milenium ketiga bukan hanya berdimensi domestik tetapi global. Dimana setiap negara mewujudkan tata kelola negara yang baik. Termasuk Indonesia yang mengupayakan dan mewujudkan konsep good governance untuk meningkatkan mutu hidup yang mumpuni. Good governance disini dapat diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Dengan adanya upaya pengimplementasian good governance ini Indonesia sebagai negara yang ikut andil dalam

perkembangan teknologi, memakai sistem Governansi digital untuk mewujudkan good governace di Indonesia.

Governansi digital atau dikenal E-Government merupakan bentuk/model sistem pemerintahan yang mengandalkan pada kekuatan teknologi digital/teknologi informasi. Dalam E-Government ini, semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam sebuah sistem. E-Government adalah perkembangan baru sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Keberadaan E-government merupakan sebagai alat pemerintahan yang berbasis eletronik agar pengerjaan di pemerintahan bisa lebih efisien/transparan dan lebih cepat. Ketika ada data yang ingin disampaikan ke masyarakat bisa lebih mudah untuk disampaikan. Dimana ideal e-government ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara.

Terkait hal tersebut Kota Padang yang merupakan salah satu kota yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia juga menerapkan hal yang sama dalam mewujudkan good governace, baik itu dimulai dari pusat kota maupun di perkampungan sudah mulai menerapkan e-government dalam memudahkan untuk menata dan mengelola daerah setempat.

Seperti halnya dengan permasalahan Sampah. Kota Padang yang pada dasarnya kota yang cukup luas dimana setidaknya memiliki penduduk sekitar 914 ribu jiwa, dan setiap hari nya menghasilkan total 640 ton sampah. 640 ton sampah yang setiap hari dihasilkan di Kota Padang, hanya sekitar 500 ton yang sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Air Dingin. Berdasarkan masalah ini kemudian pemerintah kota Padang membuat kebijakan tentang bagaimana menangani sampah tersebut dengan dibentuk Peraturan Walikota Padang No 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai bentuk pengimplementasian peraturan tersebut di dirikan bank sampah. Bank sampah ini dijadikan tempat penampungan sampah untuk di kelola kembali menjadi barang yang bermutu dan bernilai jual tinggi, dengan adanya bank sampah ini masyarakat juga dapat menabung uang maupun emas sebagai Nilai tukar dengan sampah.

Namun keberadaan bank sampah ini tetap saja masih belum di sadari masyarakat Padang dan sekitar sehingga permasalahan sampah tetap saja belum teratasi. Dengan adanya masalah tersebut kemudian daerah Kuranji kota Padang, yang merupakan salah satu pelopor bank sampah menanggulangi masalah tersebut dengan menciptakan aplikasi Bank Sampah, yang dikenal sebagai bank sampah pancadaya. Keberadaan aplikasi Bank sampah pancadaya sebagai bentuk implementasi Governansi digital di Kuranji, kota Padang. Dimana aplikasi ini sebagai wadah, sumber dan media belajar bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu penulis mencoba mengkaji mengenai “Implementasi aplikasi bang sampah pancadaya kota Padang dalam mewujudkan good governace di Kuranji, kota Padang”. Dengan melihat bagaimana aplikasi Bank Sampah panca daya ini berperan sebagai usaha tata kelola pemerintahan dalam menangani permasalahan sampah sehingga dapat mewujudkan good governace di Kuranji, kota Padang.

KAJIAN TEORITIS

2.1 Good Governace

Menurut Sadjijono, 2007 (dalam Neneng Siti Maryam. 2016:01) good governance mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan good governance adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Menurut dokumen United Nations Development Progra (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

1. E-Government (Governansi Digital)

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pailitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup:

1. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan.
2. Kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki.
3. Kondisi kegiatan layanan saat ini.
4. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

2.3 Aspek-aspek Governansi Digital

Penerapan e-Government memiliki beberapa jenis dalam memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam mengkategorikan jenis-jenis e-Government tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama. Aspek tersebut meliputi:

- a. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan.
- b. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya.

1. Peran Governansi digital dalam mewujudkan good governance

Kehadiran media sosial dengan kekuatan yang dimilikinya dapat menjadi alternatif pilihan bagi pemerintah dalam melaksanakan e-government. Besarnya minat masyarakat menggunakan media sosial, terutama melalui perangkat genggam/smartphone, bisa menjembatani penetrasi penggunaan internet yang lebih terpusat di pulau Jawa dan hambatan infrastruktur. Hal ini diharapkan bisa memperkecil kesenjangan digital (digital divide) akibat minimnya akses terhadap teknologi digital pada lingkup masyarakat berpenghasilan rendah, di daerah kecil, serta grup minoritas. Biagi, 2010 (dalam Wulan Suciska. 2016:383).

Selain itu, prinsip-prinsip dasar good governance bisa terwujud dengan penerapan e-government melalui media sosial karena selaras dengan prinsip-prinsip dasar media sosial. Esensi dari e-government adalah interaksi, lebih tepatnya mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholders) yang melibatkan penggunaan TIK (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan. Media sosial bisa membuka jalan komunikasi langsung antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Satu sisi pemerintah

terbantu dengan hadirnya media sosial karena bisa memberikan kemudahankemudahan untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Disisi lain, kemudahan dan keterbukaan ini akan meningkatkan pengawasan publik, yang akan memaksa pemerintah untuk lebih transparan dan memberikan layanan yang lebih baik lagi. Secara tidak langsung, kehadiran media sosial saat ini memberi pengaruh positif bagi terwujudnya good governance.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan deskriptif.

Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai ciri-ciri, keadaan atau frekuensi hubungan pada individu tertentu dari suatu gejala yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang akurat dan jelas yang berhubungan dengan Implementasi Aplikasi Bank Sampah Pancadaya Dalam Mewujudkan Good Governance di Kurangi Kota Padang.

Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan untuk pengambilan data, yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang akurat dan jelas sumbernya yang membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan metode tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah peneliti disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari analisis beberapa dokumen baik tertulis ataupun gambar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga data dokumentasi ini dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang masih kurang dari wawancara dan observasi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Kantor Bank Sampah Pancadaya Kuranji, Implementasi Aplikasi Bank Sampah dijalankan oleh pemimpin kantor Bank Sampah Pancadaya Kuranji dan anggota nya kemudian di manfaatkan oleh masyarakat Kuranji.

Aplikasi Bank Sampah Pancadaya Kuranji dilaksanakan untuk meningkatkan wujud peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan Kuranji. Aplikasi Bank Sampah Pancadaya sebagai pendukung terwujudnya good governace di Kuranji Padang menyediakan market place untuk masyarakat. Berbagai macam fitur diberikan seperti booking penjemputan sampah, penjualan produk sampah yang diolah kembali, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan

pengolahan.

Aplikasi bank sampah pancadaya memberikan manfaat sebagai pembuka lapangan kerja untuk masyarakat, masyarakat umum juga dapat mengakses aplikasi bank sampah terdekat dan mendaftar jadi nasabah, dan aplikasi bank sampah ini mengurangi aktivitas masyarakat membuang sampah sembarangan karena menyediakan jasa penjemputan sampah.

Selama proses penelitian di lapangan dikatakan bahwa hambatan selama Pengimplementasian aplikasi Bank Sampah Pancadaya Kuranji kota Padang yaitu terdiri atas beberapa faktor. Pertama faktor dari sumber daya manusia sendiri. Dimana untuk daya serap masyarakat Kuranji kota Padang terhadap penggunaan aplikasi Bank sampah cukup rendah. Karena pada umumnya masyarakat yang disana berumur 40-50 tahun, sehingga terkendala pengetahuan terkait pemakaian aplikasi.

Aplikasi Bank Sampah Pancadaya juga belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Karena pada fitur aplikasi tidak dibuatkan terkait pelayanan kepada masyarakat, dan pengolahan data-data masyarakat yang melakukan transaksi sampah.

Aplikasi Bank sampah pancadaya Kuranji kota Padang juga belum difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah kota, sehingga juga terbatas atas saran dan prasarana, dan juga terkendala terkait jaringan yang membuat masyarakat lama dalam mengakses aplikasi Bank sampah pancadaya Kuranji kota Padang.

Dengan itu aplikasi Bank Sampah Pancadaya Kuranji kota Padang belum mampu secara maksimal membantu pemerintah kota dalam melakukan pemerataan good governace untuk kota Padang terkhususnya kecamatan Kuranji dalam pengolahan Sampah Rumah tangga masyarakat.

Solusi menghadapi permasalahan Pengimplementasian aplikasi Bank Sampah Pancadaya Kuranji kota Padang dilakukan yaitu untuk Sumber daya manusia maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Secara umumnya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat juga dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah. Juga mengikutsertakan pemuda dalam sosialisasi aplikasi Bank Sampah Pancadaya Kuranji kota Padang, karena pada dasarnya pemuda pada saat ini lebih banyak mengakses gadget daripada orang dewasa.

Peningkatan Sumber Daya Manusia pada pegawai bank sampah pancadaya Kuraji untuk implementasi e-government juga perlu dilakukan. Dimana sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk mengubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dalam mengelola teknologi.

Untuk kendala fitur aplikasi bisa dapat dilakukan pembaruan atau upgrade aplikasi dengan menambahkan fitur pelayanan lengkap agar memudahkan admin dan masyarakat untuk mengelola dan memakai aplikasi.

Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana maka diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dana terkait Pengimplementasian aplikasi dan merangkul pihak swasta dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum e-government dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (Government to Citizen). Dengan adanya kemajuan teknologi yang mendukung kemudahan dalam berbagai sektor kehidupan diharapkan dapat mewujudkan banyak harapan salah satunya membawa perubahan birokrasi pemerintahan untuk menciptakan good governance.

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai jenis sampah yang telah dipisahkan menurut jenisnya untuk disimpan di penampungan Lingkungan. Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan, seperti menjadikan lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan menjadikan sampah sebagai barang ekonomi. Aplikasi bank sampah Resik mewakili generasi muda milenial untuk ikut serta menjaga lingkungan dengan mudah, nyaman dan efisien. Untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat, kita harus melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi lingkungan dengan membangun bank sampah di setiap desa, serta mendigitalkannya dengan menggunakan

aplikasi bank sampah yang tersedia. Apalagi aplikasi Resik mudah dioperasikan.

Aplikasi Bank Sampah Pancadaya sebagai penunjang terwujudnya good governance di Kuranji Padang menyediakan market place bagi masyarakat. Aplikasi Bank Sampah Pancadaya juga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Karena fitur aplikasi tidak terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, dan pengolahan data orang yang melakukan transaksi sampah. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, Solusinya berupa kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah pusat dan daerah dibantu pihak swasta harus meningkatkan akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi seluruh lapisan masyarakat dari atas hingga ke bawah.

Saran

Perlunya pengembangan Aplikasi bank sampah dalam wacana dan sosialisasi pendidikan mengenai sampah berdasarkan pemahaman orang yang mampu memunculkan agen yang memiliki motivasi dan komitmen yang mendalam menetapkan strategi inovatif untuk pengembangan aplikasi bank sampah berkelanjutan. diperlukan pula dukungan dan peran dari pemerintah daerah. Terutama dalam bentuk sosialisasi, pemberian dana hibah atau pinjaman modal, dan pelibatan pihak swasta, melalui Corporate Social Responsibility (CSR), untuk membantu pengembangan aplikasi Bank Sampah.

DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Walikota Padang No 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Jurnal dan Buku

Agung Kurniawan.2013. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaruan
Agustine Eva. 2005. Konsep E-government: Tantangan peningkatan pelayanan pada masyarakat. SNATI: Yogyakarta.

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gaya Media, Yogyakarta

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta. Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi e-Government*. Yogyakarta: Andi.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004. *E-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.

Maryam, Neneng Siti. (2016). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. VI (1): 1-18.

Misnawati, M. (2022). *Teori Ekopuitika untuk Penelitian Sastra Lisan*. Drestanta Pelita Indonesia Press.

Nainggolan. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pertja.

Perdana, I., & Misnawati, M. P. (2019). *Cinta dan Bangga Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. SPASI MEDIA.

Perdana, I. Misnawati. 2021. *Evaluasi Pembelajaran*.

Poerwadi, P., & Misnawati, M. P. *Deder dan Identitas Kultural Masyarakat Dayak Ngaju*. GUEPEDIA.

Purba, A. I. (2022). *Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 45-56.

- Rahmatullah, A. S., & Ghufron, S. (2021). *The Effectiveness Of'facebook'as Indonesian Language Learning Media For Elementary School Student: Distance Learning Solutions In The Era Of The Covid-19 Pandemic*. MULTICULTURAL EDUCATION, 7(04), 27-37.
- Rinto Alexandro, M. M., Misnawati, M. P., & Wahidin, M. P. (2021). *Profesi Keguruan (Menjadi Guru Profesional)*. Gue.
- Silfiah, Rossa Ilma. Dkk. (2021). DIGITALISASI BANK SAMPAH DENGAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI RESIK DI DESA KARANGSONO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*. 4 (2): 143-154.
- Suciska, Wulan. (2016). OPTIMALISASI PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *JURNAL PROSIDING SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI*. HAL 374-389.
- Simanullang, P. (2022). *Application of Introduction To Personality Psychology 5 Genetic Intelligence Through The Concept of Stifin Test*. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 100-109.
- Supriatin, Y. M., & Istiana, I. I. (2022, November). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sinar Resmi sebagai Identitas Bangsa*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 01-14).
- Suryani, Anih Sri. (2014). PERAN BANK SAMPAH DALAM EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH MALANG). *Jurnal Aspirasi*. 5 (1): 71-84.

Usop, L. S. (2020). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 1(1), 89-95.

Wiyanto, M. S., Misnawati, M., & Dwiyanti, D. R. (2022). *Penerapan Strategi Penolakan dalam Komunikasi Pembelajaran Bahasa Inggris antara Guru dan Siswa di SMK PGRI 1 Jombang*. EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 4(2), 3076-3084.